



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan WALI KOTA tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sulawesi-Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2207/X/Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALOPO tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan WALI KOTA ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. WALI KOTA adalah WALI KOTA Palopo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar **Rp977.636.368.667,-** (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar **Rp27.668.653.602,-** (Dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) sehingga menjadi **Rp1.005.305.022.269,-** (Satu triliun lima milyar tiga ratus lima juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	962.577.743.667	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	18.398.584.734	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.		980.976.328.401
b. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	977.636.368.667	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	27.668.653.602	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.		1.005.305.022.269
c. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	18.000.000.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	9.270.068.868	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		27.270.068.868
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	2.941.375.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		2.941.375.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.		24.328.693.868
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WALI KOTA ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan WALI KOTA ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan WALI KOTA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WALI KOTA ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Oktober 2024

W. WALI KOTA PALOPO,



Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

ILHAM

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 56



KOTA PALOPO

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	238.905.271.486,00	248.604.221.220,00	9.698.949.734,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.417.000.000,00	49.197.000.000,00	-220.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	-150.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	950.000.000,00	1.000.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	950.000.000,00	1.000.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.300.000.000,00	7.380.000.000,00	80.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.120.000.000,00	3.900.000.000,00	-220.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.120.000.000,00	3.900.000.000,00	-220.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	800.000.000,00	1.050.000.000,00	250.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	800.000.000,00	1.050.000.000,00	250.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	550.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	550.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	730.000.000,00	1.100.000.000,00	370.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	730.000.000,00	1.100.000.000,00	370.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	730.000.000,00	-370.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	730.000.000,00	-370.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.855.000.000,00	1.895.000.000,00	40.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	635.000.000,00	655.000.000,00	20.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	635.000.000,00	655.000.000,00	20.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	705.000.000,00	700.000.000,00	-5.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	705.000.000,00	700.000.000,00	-5.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.180.000.000,00	2.550.000.000,00	370.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.750.000.000,00	2.100.000.000,00	350.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.750.000.000,00	2.100.000.000,00	350.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	280.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	280.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000,00	17.400.000.000,00	400.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17.000.000.000,00	17.400.000.000,00	400.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17.000.000.000,00	17.400.000.000,00	400.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	400.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	400.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	400.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.677.000.000,00	5.677.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.677.000.000,00	5.677.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.677.000.000,00	5.677.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.700.000.000,00	11.800.000.000,00	100.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.700.000.000,00	11.800.000.000,00	100.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	11.700.000.000,00	11.800.000.000,00	100.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.931.644.000,00	156.195.006.587,00	143.263.362.587,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.409.469.000,00	149.475.417.587,00	143.065.948.587,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.405.869.000,00	144.381.817.587,00	142.975.948.587,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.345.869.000,00	16.496.493.485,00	15.150.624.485,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	127.585.324.102,00	127.585.324.102,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	60.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.333.600.000,00	1.373.600.000,00	40.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	518.600.000,00	558.600.000,00	40.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.019.175.000,00	3.216.589.000,00	197.414.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	769.175.000,00	899.175.000,00	130.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	159.175.000,00	159.175.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	250.000.000,00	130.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	138.000.000,00	240.414.000,00	102.414.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	138.000.000,00	240.414.000,00	102.414.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	688.000.000,00	653.000.000,00	-35.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	38.000.000,00	3.000.000,00	-35.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.503.000.000,00	3.503.000.000,00	0,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.600.000.000,00	8.020.016.252,00	420.016.252,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.600.000.000,00	8.020.016.252,00	420.016.252,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.600.000.000,00	8.020.016.252,00	420.016.252,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.600.000.000,00	8.020.016.252,00	420.016.252,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	168.956.627.486,00	35.192.198.381,00	-133.764.429.105,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	143.100.000,00	143.100.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	143.100.000,00	143.100.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	143.100.000,00	143.100.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.878.000.000,00	25.878.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	5.878.000.000,00	5.878.000.000,00	0,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	5.878.000.000,00	5.878.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.822.000.000,00	1.822.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	257.000.000,00	257.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	257.000.000,00	257.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
4.1.04.15.15.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	136.328.627.486,00	544.098.381,00	-135.784.529.105,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	136.328.627.486,00	544.098.381,00	-135.784.529.105,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	136.328.627.486,00	544.098.381,00	-135.784.529.105,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	723.672.472.181,00	732.372.107.181,00	8.699.635.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.261.164.000,00	656.518.045.000,00	256.881.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	656.261.164.000,00	656.518.045.000,00	256.881.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.687.568.000,00	13.944.449.000,00	256.881.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.808.813.000,00	2.808.813.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.318.010.000,00	7.318.010.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	256.881.000,00	256.881.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	369.490.000,00	369.490.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.086.594.000,00	2.086.594.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.098.486.000,00	1.098.486.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	521.857.620.000,00	521.857.620.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	521.857.620.000,00	521.857.620.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	23.447.814.000,00	23.447.814.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	839.371.000,00	839.371.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.985.810.000,00	5.985.810.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.884.289.000,00	2.884.289.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.771.792.000,00	1.771.792.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	199.995.000,00	199.995.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.704.057.000,00	8.704.057.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.062.500.000,00	3.062.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	97.268.162.000,00	97.268.162.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.519.400.000,00	24.519.400.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	905.000.000,00	905.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.504.466.000,00	47.504.466.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	309.964.000,00	309.964.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.696.200.000,00	1.696.200.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	621.500.000,00	621.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.874.704.000,00	16.874.704.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.934.110.000,00	3.934.110.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	406.818.000,00	406.818.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.411.308.181,00	75.854.062.181,00	8.442.754.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.991.212.181,00	57.991.212.181,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.991.212.181,00	57.991.212.181,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.739.959.643,00	18.739.959.643,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.078.211.100,00	9.078.211.100,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.199.091.000,00	17.199.091.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	187.513.148,00	187.513.148,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.786.437.290,00	12.786.437.290,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.420.096.000,00	17.862.850.000,00	8.442.754.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	9.420.096.000,00	17.862.850.000,00	8.442.754.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.420.096.000,00	17.862.850.000,00	8.442.754.000,00
	Jumlah Pendapatan	962.577.743.667,00	980.976.328.401,00	18.398.584.734,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	847.009.719.236,00	889.017.790.694,00	42.008.071.458,00
5.1.01	Belanja Pegawai	496.773.081.417,00	495.851.813.654,00	-921.267.763,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.375.186.863,00	320.725.229.725,00	-6.649.957.138,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	241.898.621.000,00	239.829.816.257,00	-2.068.804.743,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	234.429.299.000,00	232.110.319.257,00	-2.318.979.743,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.469.322.000,00	7.719.497.000,00	250.175.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.065.806.000,00	20.861.093.000,00	-204.713.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.508.872.000,00	20.282.720.000,00	-226.152.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	556.934.000,00	578.373.000,00	21.439.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.455.843.000,00	7.557.439.000,00	101.596.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.455.843.000,00	7.557.439.000,00	101.596.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.576.887.000,00	18.117.812.000,00	-1.459.075.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.754.066.000,00	17.330.350.000,00	-1.423.716.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	822.821.000,00	787.462.000,00	-35.359.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.316.964.000,00	2.808.305.000,00	-508.659.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.316.964.000,00	2.808.305.000,00	-508.659.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.038.773.863,00	11.802.572.000,00	-1.236.201.863,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.600.116.863,00	11.379.632.000,00	-1.220.484.863,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	438.657.000,00	422.940.000,00	-15.717.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	796.013.000,00	681.576.000,00	-114.437.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	796.013.000,00	681.576.000,00	-114.437.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.494.000,00	3.452.000,00	-1.042.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.417.000,00	3.382.000,00	-1.035.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	77.000,00	70.000,00	-7.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.827.484.000,00	16.746.799.468,00	919.315.468,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.073.714.000,00	15.883.577.468,00	809.863.468,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	753.770.000,00	863.222.000,00	109.452.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	578.050.000,00	577.191.000,00	-859.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	560.134.000,00	558.675.000,00	-1.459.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	17.916.000,00	18.516.000,00	600.000,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.734.031.000,00	1.727.174.000,00	-6.857.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.680.286.000,00	1.671.628.000,00	-8.658.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	53.745.000,00	55.546.000,00	1.801.000,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.082.220.000,00	12.000.000,00	-2.070.220.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.082.220.000,00	12.000.000,00	-2.070.220.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	100.250.647.000,00	101.564.920.000,00	1.314.273.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	100.250.647.000,00	101.564.920.000,00	1.314.273.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	97.875.423.700,00	98.189.696.700,00	314.273.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.375.223.300,00	3.375.223.300,00	1.000.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.695.148.314,00	4.653.170.170,00	-41.978.144,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.235.425.000,00	1.235.425.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	182.500.000,00	200.000.000,00	17.500.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	46.375.000,00	47.375.000,00	1.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	750.000,00	750.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	625.000,00	625.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	29.625.000,00	-20.375.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	141.925.000,00	141.925.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	292.500.000,00	294.375.000,00	1.875.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.182.373.314,00	1.239.195.170,00	56.821.856,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	690.729.314,00	616.100.170,00	-74.629.144,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	69.875.000,00	69.875.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	63.930.000,00	26.100.000,00	-37.830.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	40.459.000,00	42.370.000,00	1.911.000,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	2.430.000,00	0,00	-2.430.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	6.900.000,00	900.000,00	-6.000.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	150.000,00	150.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	175.000.000,00	350.200.000,00	175.200.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.831.050.000,00	1.658.200.000,00	-172.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.581.000.000,00	1.485.150.000,00	-95.850.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	250.050.000,00	173.050.000,00	-77.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	446.300.000,00	440.350.000,00	-5.950.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	141.800.000,00	134.000.000,00	-7.800.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	304.500.000,00	306.350.000,00	1.850.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.632.878.000,00	11.447.878.000,00	815.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	598.982.000,00	598.982.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	598.982.000,00	598.982.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.226.000,00	47.226.000,00	5.000.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.226.000,00	47.226.000,00	5.000.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	697.914.000,00	847.914.000,00	150.000.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	697.914.000,00	847.914.000,00	150.000.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.650.000.000,00	2.900.000.000,00	250.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.650.000.000,00	2.900.000.000,00	250.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.850.000,00	70.850.000,00	10.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.850.000,00	70.850.000,00	10.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.364.390.000,00	2.464.390.000,00	100.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	62.190.000,00	62.190.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.297.200.000,00	2.397.200.000,00	100.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.332.016.000,00	3.332.016.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.332.016.000,00	3.332.016.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	396.516.000,00	207.688.000,00	-188.828.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.130.000,00	0,00	-60.130.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.130.000,00	0,00	-60.130.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.017.000,00	0,00	-6.017.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.017.000,00	0,00	-6.017.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.273.000,00	0,00	-108.273.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.273.000,00	0,00	-108.273.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.474.000,00	0,00	-4.474.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.474.000,00	0,00	-4.474.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.367.000,00	0,00	-2.367.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.367.000,00	0,00	-2.367.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	24.000,00	0,00	-24.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	24.000,00	0,00	-24.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.979.000,00	0,00	-6.979.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.979.000,00	0,00	-6.979.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.000,00	0,00	-137.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.000,00	0,00	-137.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	427.000,00	0,00	-427.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	427.000,00	0,00	-427.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	197.668.000,00	197.668.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	120.000,00	120.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	100.000,00	100.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.708.000,00	22.708.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	320.000,00	320.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	862.080.000,00	712.080.000,00	-150.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	262.080.000,00	262.080.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	262.080.000,00	262.080.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	450.000.000,00	-150.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	450.000.000,00	-150.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	52.560.625.240,00	56.540.847.759,00	3.980.222.519,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	52.560.625.240,00	56.540.847.759,00	3.980.222.519,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	52.560.625.240,00	56.540.847.759,00	3.980.222.519,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.918.492.829,00	346.824.069.666,00	28.905.576.837,00
5.1.02.01	Belanja Barang	41.356.231.775,00	46.555.233.085,00	5.199.001.310,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.336.731.775,00	46.545.233.085,00	5.208.501.310,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	321.416.870,00	301.030.570,00	-20.386.300,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	37.108.000,00	44.108.000,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.029.151.950,00	4.287.021.729,00	-742.130.221,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	244.373.000,00	255.959.071,00	11.586.071,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	116.372.600,00	105.201.000,00	-11.171.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.137.500,00	3.087.500,00	1.950.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	40.880.000,00	23.240.000,00	-17.640.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.095.000,00	84.122.000,00	63.027.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.407.800,00	453.000,00	-4.954.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.709.815.387,00	4.110.592.014,00	400.776.627,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.191.743.988,00	3.427.782.104,00	236.038.116,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	90.696.000,00	118.692.000,00	27.996.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.790.000,00	2.790.000,00	-1.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	341.844.300,00	408.974.162,00	67.129.862,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.155.660.525,00	1.408.713.600,00	253.053.075,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	433.134.000,00	419.684.000,00	-13.450.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.300.000,00	300.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	146.600.000,00	30.600.000,00	-116.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	512.073.870,00	697.420.400,00	185.346.530,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	553.539.000,00	3.990.298.706,00	3.436.759.706,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.437.459.700,00	6.400.149.700,00	-1.037.310.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.474.171.000,00	4.703.621.000,00	2.229.450.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.825.807.786,00	3.545.575.322,00	-280.232.464,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.469.510.000,00	3.634.030.004,00	164.520.004,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	871.802.500,00	912.040.000,00	40.237.500,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.000.000,00	11.400.000,00	5.400.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.179.985.000,00	5.604.595.504,00	424.610.504,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	148.234.499,00	162.622.499,00	14.388.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	678.995.000,00	621.330.200,00	-57.664.800,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	125.000.000,00	62.500.000,00	-62.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.015.000,00	7.215.000,00	-48.800.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	93.221.500,00	98.894.000,00	5.672.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	160.820.000,00	160.620.000,00	-200.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.500.000,00	10.000.000,00	-9.500.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	120.000.378.259,00	125.214.391.710,00	5.214.013.451,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.008.175.748,00	88.266.205.477,00	258.029.729,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.339.750.000,00	1.574.125.000,00	234.375.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.712.550.000,00	3.450.700.000,00	-261.850.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.374.800.000,00	2.374.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00	6.200.000,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	44.760.000,00	34.120.000,00	-10.640.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	529.200.000,00	441.900.000,00	-87.300.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.448.384.000,00	3.747.144.000,00	298.760.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	61.410.000,00	344.215.000,00	282.805.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	18.331.800.000,00	18.480.300.000,00	148.500.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	577.300.000,00	644.750.030,00	67.450.030,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	469.200.000,00	441.600.000,00	-27.600.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	445.250.000,00	440.000.000,00	-5.250.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	45.000.000,00	80.000.000,00	35.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.199.250.000,00	9.817.140.000,00	-382.110.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.765.200.000,00	2.654.500.000,00	-110.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	730.500.000,00	705.186.000,00	-25.314.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.849.941.500,00	3.570.992.000,00	-278.949.500,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.323.620.000,00	12.297.398.200,00	-26.221.800,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	443.150.000,00	418.950.000,00	-24.200.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	354.800.000,00	350.950.000,00	-3.850.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.273.660.000,00	2.215.960.000,00	-57.700.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	933.300.000,00	930.800.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.800.000,00	1.000.000,00	-6.800.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	18.000.000,00	16.200.000,00	-1.800.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	17.210.440,00	18.762.090,00	1.551.650,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.044.000.000,00	1.009.000.000,00	-35.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	12.800.000,00	24.000.000,00	11.200.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	14.000.000,00	49.592.000,00	35.592.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	60.784.290,00	311.688.000,00	250.903.710,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	272.400.000,00	200.000.000,00	-72.400.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	111.847.000,00	20.000.000,00	-91.847.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.683.608.000,00	1.975.808.000,00	292.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	32.330.000,00	26.880.000,00	-5.450.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	979.594.256,00	907.218.216,00	-72.376.040,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.468.276.342,00	8.965.139.916,00	496.863.574,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	653.063.000,00	513.201.035,00	-139.861.965,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.774.039.920,00	1.811.304.920,00	37.265.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	10.545.000,00	15.117.000,00	4.572.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	115.000.000,00	105.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	567.452.000,00	561.250.070,00	-6.201.930,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.367.200.000,00	6.354.914.000,00	-12.286.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	250.000.000,00	65.000.000,00	-185.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.139.195.360,00	30.682.396.268,00	5.543.200.908,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	24.120.096.000,00	29.576.771.100,00	5.456.675.100,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	82.040.000,00	85.400.000,00	3.360.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	263.225.760,00	274.995.408,00	11.769.648,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	49.733.600,00	70.829.760,00	21.096.160,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	223.300.000,00	273.600.000,00	50.300.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.530.700.000,00	1.664.825.000,00	134.125.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	900.000.000,00	983.650.000,00	83.650.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	88.800.000,00	114.600.000,00	25.800.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	525.900.000,00	475.575.000,00	-50.325.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	857.290.000,00	1.318.591.000,00	461.301.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	121.200.000,00	694.321.000,00	573.121.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	466.000.000,00	436.320.000,00	-29.680.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	56.500.000,00	10.000.000,00	-46.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	188.590.000,00	152.950.000,00	-35.640.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	565.000.000,00	665.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	490.000.000,00	590.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.689.655.151,00	1.347.011.965,00	-1.342.643.186,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	523.234.000,00	136.119.000,00	-387.115.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.166.421.151,00	1.210.892.965,00	-955.528.186,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.037.757.000,00	1.037.757.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	153.300.000,00	168.000.000,00	14.700.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	38.955.000,00	39.795.000,00	840.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	357.000.000,00	357.000.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	630.000,00	630.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	525.000,00	525.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.000.000,00	24.885.000,00	-17.115.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	119.217.000,00	119.217.000,00	0,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	245.700.000,00	247.275.000,00	1.575.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	52.605.000,00	52.605.000,00	0,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.925.000,00	50.925.000,00	0,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.201.030.296,00	13.379.937.544,00	178.907.248,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.380.740.686,00	5.757.458.940,00	376.718.254,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.236.805.980,00	3.392.555.980,00	155.750.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	806.300.000,00	1.028.100.000,00	221.800.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	471.534.706,00	341.302.960,00	-130.231.746,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	54.100.000,00	35.500.000,00	-18.600.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	148.800.000,00	196.800.000,00	48.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.000.000,00	3.000.000,00	-6.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	313.150.000,00	350.650.000,00	37.500.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	26.000.000,00	36.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	157.050.000,00	200.550.000,00	43.500.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	38.000.000,00	53.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.918.289.610,00	1.953.978.604,00	35.688.994,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.488.289.610,00	1.633.978.604,00	145.688.994,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	80.000.000,00	70.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	320.000.000,00	250.000.000,00	-70.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.680.000.000,00	5.446.500.000,00	-233.500.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.660.000.000,00	5.436.500.000,00	-223.500.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.040.124.953,00	39.470.650.198,00	6.430.525.245,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.790.124.953,00	39.470.650.198,00	6.680.525.245,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.534.549.953,00	30.123.663.698,00	5.589.113.745,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.928.745.000,00	6.849.361.500,00	920.616.500,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.326.830.000,00	2.497.625.000,00	170.795.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	375.600.000,00	208.050.000,00	-167.550.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	322.600.000,00	151.050.000,00	-171.550.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	106.000.000,00	63.000.000,00	-43.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	216.600.000,00	88.050.000,00	-128.550.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	53.000.000,00	57.000.000,00	4.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	52.000.000,00	56.000.000,00	4.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.787.246.000,00	16.675.071.488,00	-1.112.174.512,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.787.246.000,00	16.675.071.488,00	-1.112.174.512,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.787.246.000,00	16.675.071.488,00	-1.112.174.512,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.508.573.000,00	11.891.946.319,00	-4.616.626.681,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.508.573.000,00	11.891.946.319,00	-4.616.626.681,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.508.573.000,00	11.891.946.319,00	-4.616.626.681,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.649.308.546,00	93.428.789.322,00	17.779.480.776,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.649.308.546,00	93.428.789.322,00	17.779.480.776,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.649.308.546,00	93.428.789.322,00	17.779.480.776,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.150.000.000,00	900.000.000,00	-250.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.150.000.000,00	900.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.150.000.000,00	900.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.150.000.000,00	900.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	31.012.144.990,00	45.285.907.374,00	14.273.762.384,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	20.400.000.000,00	34.300.000.000,00	13.900.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.400.000.000,00	34.300.000.000,00	13.900.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.400.000.000,00	34.300.000.000,00	13.900.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.980.000.000,00	2.755.000.000,00	-225.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	695.000.000,00	635.000.000,00	-60.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	695.000.000,00	635.000.000,00	-60.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.875.000.000,00	1.825.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.875.000.000,00	1.825.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	410.000.000,00	295.000.000,00	-115.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	410.000.000,00	295.000.000,00	-115.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	854.592.490,00	863.154.874,00	8.562.384,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	854.592.490,00	863.154.874,00	8.562.384,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	854.592.490,00	863.154.874,00	8.562.384,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	6.777.552.500,00	7.367.752.500,00	590.200.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.729.100.000,00	5.319.300.000,00	590.200.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.729.100.000,00	5.319.300.000,00	590.200.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.543.200.000,00	1.543.200.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.543.200.000,00	1.543.200.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	505.252.500,00	505.252.500,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	505.252.500,00	505.252.500,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	123.626.649.431,00	115.287.231.575,00	-8.339.417.856,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.070.000.000,00	2.434.826.000,00	-2.635.174.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.070.000.000,00	2.434.826.000,00	-2.635.174.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	580.000.000,00	418.970.000,00	-161.030.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	305.000.000,00	295.000.000,00	-10.000.000,00
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	275.000.000,00	123.970.000,00	-151.030.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	4.490.000.000,00	2.015.856.000,00	-2.474.144.000,00
5.2.01.01.03.0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	595.000.000,00	430.000.000,00	-165.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.055.000.000,00	200.650.000,00	-1.854.350.000,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.840.000.000,00	1.385.206.000,00	-454.794.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.479.949.732,00	22.818.773.446,00	-4.661.176.286,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.981.004.300,00	1.521.884.298,00	-459.120.002,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.981.004.300,00	1.521.884.298,00	-459.120.002,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	333.600.000,00	0,00	-333.600.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	247.404.300,00	121.884.298,00	-125.520.002,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	21.221.000,00	30.500.000,00	9.279.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	21.221.000,00	30.500.000,00	9.279.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	21.221.000,00	30.500.000,00	9.279.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.316.609.660,00	2.048.092.200,00	-268.517.460,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	338.770.010,00	75.601.230,00	-263.168.780,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.982.230,00	9.982.230,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	328.787.780,00	65.619.000,00	-263.168.780,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.870.039.160,00	1.842.365.980,00	-27.673.180,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	840.847.610,00	878.628.630,00	37.781.020,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10.354.000,00	12.004.000,00	1.650.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	632.247.710,00	656.448.690,00	24.200.980,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	271.969.840,00	180.664.660,00	-91.305.180,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	114.620.000,00	114.620.000,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	107.800.490,00	130.124.990,00	22.324.500,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	47.313.490,00	45.811.990,00	-1.501.500,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	19.575.000,00	25.125.000,00	5.550.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	40.912.000,00	59.188.000,00	18.276.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	296.763.280,00	350.021.390,00	53.258.110,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	296.763.280,00	350.021.390,00	53.258.110,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	139.187.490,00	82.087.490,00	-57.100.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	157.575.790,00	267.933.900,00	110.358.110,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.921.292.000,00	5.142.191.000,00	220.899.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.000.000,00	300.000.000,00	288.000.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.000.000,00	300.000.000,00	288.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.909.292.000,00	4.842.191.000,00	-67.101.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.909.292.000,00	4.842.191.000,00	-67.101.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	640.675.000,00	481.925.000,00	-158.750.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	640.675.000,00	481.925.000,00	-158.750.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	640.675.000,00	481.925.000,00	-158.750.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.711.620.092,00	2.871.385.477,00	-3.840.234.615,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.951.428.500,00	1.922.747.560,00	-28.680.940,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.951.428.500,00	1.922.747.560,00	-28.680.940,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.760.191.592,00	948.637.917,00	-3.811.553.675,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	736.791.592,00	806.521.352,00	69.729.760,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.022.700.000,00	38.073.000,00	-3.984.627.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	700.000,00	104.043.565,00	103.343.565,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.440.570.700,00	1.136.590.248,00	-303.980.452,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.440.570.700,00	1.136.590.248,00	-303.980.452,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.440.570.700,00	1.136.590.248,00	-303.980.452,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.668.693.700,00	7.754.683.833,00	85.990.133,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.668.693.700,00	7.754.683.833,00	85.990.133,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.668.693.700,00	7.754.683.833,00	85.990.133,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.763.157.199,00	34.126.191.207,00	-636.965.992,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.679.957.199,00	32.943.521.207,00	-736.435.992,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.379.957.199,00	31.613.721.207,00	-766.235.992,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	810.000.000,00	1.156.250.000,00	346.250.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.265.880.000,00	3.265.880.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.474.544.400,00	4.974.544.400,00	-1.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.918.346.360,00	8.194.108.610,00	275.762.250,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.547.419.600,00	5.579.419.600,00	32.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.852.689.199,00	7.924.789.199,00	72.100.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	200.000.000,00	99.500.000,00	-100.500.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	311.077.640,00	419.229.398,00	108.151.758,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.300.000.000,00	1.329.800.000,00	29.800.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.000.000.000,00	981.300.000,00	-18.700.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	300.000.000,00	298.500.000,00	-1.500.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	108.400.000,00	108.220.000,00	-180.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	108.400.000,00	108.220.000,00	-180.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	108.400.000,00	108.220.000,00	-180.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	524.800.000,00	324.450.000,00	-200.350.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	524.800.000,00	324.450.000,00	-200.350.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	524.800.000,00	324.450.000,00	-200.350.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	450.000.000,00	750.000.000,00	300.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	450.000.000,00	750.000.000,00	300.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	450.000.000,00	750.000.000,00	300.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.106.811.700,00	52.532.749.272,00	-1.574.062.428,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	24.604.695.700,00	23.418.761.000,00	-1.185.934.700,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	23.859.695.700,00	22.769.761.000,00	-1.089.934.700,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	22.709.095.700,00	21.533.161.000,00	-1.175.934.700,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	635.600.000,00	721.600.000,00	86.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	745.000.000,00	649.000.000,00	-96.000.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	745.000.000,00	649.000.000,00	-96.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	28.358.116.000,00	27.978.633.272,00	-379.482.728,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.439.000.000,00	25.544.317.272,00	105.317.272,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.439.000.000,00	25.544.317.272,00	105.317.272,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.819.116.000,00	2.334.316.000,00	-484.800.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.819.116.000,00	2.334.316.000,00	-484.800.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.144.000.000,00	1.135.355.000,00	-8.645.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.144.000.000,00	1.135.355.000,00	-8.645.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.144.000.000,00	1.135.355.000,00	-8.645.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.206.730.800,00	3.174.691.650,00	967.960.850,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	470.000.000,00	597.250.000,00	127.250.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	470.000.000,00	597.250.000,00	127.250.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	470.000.000,00	597.250.000,00	127.250.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.736.730.800,00	2.577.441.650,00	840.710.850,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.736.730.800,00	2.577.441.650,00	840.710.850,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.736.730.800,00	2.577.441.650,00	840.710.850,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	977.636.368.667,00	1.005.305.022.269,00	27.668.653.602,00
	Total Surplus/(Defisit)	-15.058.625.000,00	-24.328.693.868,00	-9.270.068.868,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
6.2.03.01.02.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	15.058.625.000,00	24.328.693.868,00	9.270.068.868,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Palopo, 1 Oktober 2024

Pj Walikota

